

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui melalui ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan perubahan-perubahan tersebut telah membuktikan bahwa pembenahan sistem pemerintahan daerah terus berjalan dinamis seiring dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Menurut Undang – Undang Nomor 23 Pasal 1 ayat (6) Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatakan bahwa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD pemerintah atas Keuangan Negara, presiden

menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung jawaban APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah harus ada pengawasan dan pengendalian yang bertujuan agar setiap alokasi belanja daerah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan secara komprehensif dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakan: untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan atas kegiatan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPI) diharapkan upaya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat lebih dipacu sehingga ke depan dapat memperoleh opini WTP berarti opini tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengembalian keputusan oleh para pemaku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu, sistem pengendalian intern (SPI) yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.

Dari hasil pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bandung yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem pengendalian Internal (SPI) pada setiap entitas yang diperiksa, dalam evaluasi tersebut BPK di antaranya menemukan beberapa kasus kelemahan SPI. Penemuan kasus-kasus tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih ada permasalahan dalam proses transformasi akuntansi sektor publik di Kota Bandung. Harapan atas berfungsinya SPI dalam rangka mengurangi korupsi dan kolusi, meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ternyata masih belum dapat menunjukkan kontribusinya secara maksimal.

Terkait dengan fenomena tersebut tentang akuntabilitas dan transparansi melalui opini laporan keuangan Pemerintah Daerah, Kota Bandung yang

sedang melaksanakan pemantapan kinerja pemerintah daerahnya melalui peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, juga berkepentingan dengan opini BPK terhadap kualitas laporan keuangan daerahnya. Dalam IHPS semester 1 Tahun 2016 dan IHPS semester 2 tahun 2015 yang dilaporkan BPK, kota bandung belum mendapatkan Opini WTP.

Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh LKPD Kota Bandung masih belum sesuai dengan yang diharapkan, dari tahun 2014-2016 entitas LKPD Kota Bandung masih mendapatkan opini dari BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP), BPK melaporkan hasil evaluasi SPI terhadap Laporan Keuangan Kota Bandung, ditemukannya beberapa kelemahan Pengendalian Internal terkait pengelolaan dan penyajian, Persediaan per 31 Desember 2014, yaitu adanya kelemahan sistem pengendalian internal kekurangan penerimaan pajak Reklame sebesar Rp. 1.490.053.385,00

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2014**

No	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%
1	Hotel	202.850.000.000,00	204.152.062.826,00	101%
2	Restoran	140.000.000.000,00	146.399.711.300,00	102%
3	Hiburan	45.000.000.000,00	40.730.151.211,00	91%
4	Reklame	24.000.000.000,00	23.643.479.085,00	99%
5	Penerangan Jalan	158.000.000.000,00	159.123.681.023,00	101%
6	Parkir	12.000.000.000,00	12.155.079.775,00	101%
7	Air Tanah	30.000.000.000,00	26.032.655.125,00	87%
8	PBB Perkotaan	360.000.000.000,00	372.575.609.204,00	103%
9	BPHTB	428.150.000.000,00	418.786.427.368,00	98%
	Jumlah	1.400.000.000.000,00	1.399.598.856.917,00	99,97%

Sumber; BPK Prov. Jawa Barat 2018

Pada Tabel 1.1 tahun 2014, berdasarkan hasil pengujian silang antara data ketetapan Pajak Reklame dan izin reklame menunjukn terdapat 368 reklame yang telah diterbitkan izinnya oleh BPpt tetapi tidak diterbitkan SKPD-nya oleh Disyanjak. Berdasarkan hasil perhitungan Bidang Penetapan Disyanjak, nilai pajak reklame yang belum diterbitkan SKPD dan belum diterima pembayarannya sebesar Rp1.490.053.385,00.

Pada persediaan per 31 Desember 2015 yaitu adanya kelemahan dalam penyajian piutang pajak pemerintah kota bandung per 31 Desember 2015 Sebesar Rp7.378.969.054,00 tidak dapat dinyakini kewajaranya.

**Tabel 1.2**  
**Rincian Piutang Pajak Tahun 2015**

No	Jenis Pajak	2015 (Rp)	2014 (Rp)
I	Pajak Pendaftaran		
	Pajak Hotel	4.630.557.979,86	1.720.650.508,70
	Pajak Restoran	7.921.568.629,36	4.041.249.095,67
	Pajak Hiburan	5.338.990.006,36	3.081.977.059,05
	Pajak Penerangan Jalan	0,00	
	Pajak Parkir	2.935.886.467,75	2.146.511.265,00
	BPHTB	1.658.408.911,00	1.658.408.911,00
	Jumlah	22.485.411.994,45	12.648.796.839,42
II	Pajak Penetapan		
	Pajak Air Tanah (PAT)	8.403.407.830,00	10.455.639.269,42
	Pajak Reklame	12.479.850.791,42	5.857.488.479,00
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	921.528.132.771,00	806.638.914.500,00
	Jumlah	942.411.391.392,42	822.952.042.248,42
	Total	964.896.803.387,25	835.600.839.087,84

Sumber; BPK Prov. Jawab Barat 2018

Pada tabel 1.2 tahun 2015 Pemerintah Kota Bandung menyajikan hasil pemeriksaan penyajian Piutang Pajak untuk tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pengendalian intern dalam pengelolaan piutang pajak, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak sebesar Rp652.420.156,00 diakui telah membayar oleh WP.

**Tabel 1.3**  
**Rincian Piutang yang diakui Telah Dibayar Oleh WP**

No	jenis Pajak	Nilai Piutang (Rp)			
		Tahun 2012		Tahun 2013	Total
		Investarisasi	Hasil Komfirmasi		
1	Pajak Hotel	31.430.641,00			31.430.641,00
2	Pajak Restoran	296.939.392,00	14.332.000,00		311.271.392,00
3	Pajak Hiburan	8.246.514,00	26.250.000,00		34.496.514,00
4	Pajak Parkir		23.189.520,00	1.850.000,00	25.039.520,00
5	Pajak Reklame	2.846.875,00	214.594.900,00	23.920.750,00	241.362.525,00
6	Pajak PAT		8.819.564,00		8.819.564,00
<b>Total</b>		<b>339.463.422,00</b>	<b>287.185.984,00</b>	<b>25.770.750,00</b>	<b>652.420.156,00</b>

Sumber; BPK Prov. Jawa Barat 2018

- b. Piutang Pajak sebesar Rp449.210.035,00 tidak diakui sebagai hutang oleh WP.

**Tabel 1.4**  
**Rincian Piutang yang Tidak Diakui oleh WP**

No	jenis Pajak	Nilai Piutang (Rp)		Jumlah
		Tahun 2012	Tahun 2013	
1	Pajak Hotel	10.449.125,00	13.984.500,00	24.433.625,00
2	Pajak Restoran	46.092.610,00		46.092.610,00
3	Pajak Hiburan			
4	Pajak Parkir	99.731.686,00	6.777,024,00	106.508.710,00
5	Pajak Reklame	268.746.250,00		268.746.250,00
6	Pajak PAT		3.428.840,00	3.428.840,00
<b>Jumlah</b>		<b>425.019.671,00</b>	<b>24.190.364,00</b>	<b>449.210.035,00</b>

*Sumber; BPK Prov. Jawa Barat 2018*

- c. Piutang Pajak sebesar Rp4.636.990.220,00 tidak dapat ditelusuri

**Tabel 1.5**  
**Rincian Piutang yang Tidak dapat Ditelusuri**

No	jenis Pajak	Nilai Piutang (Rp)		Jumlah
		Tahun 2012	Tahun 2013	
1	Pajak Hotel	100.725.741,00	27.166.250,00	127.891.991,00
2	Pajak Restoran	981.110.781,00	340.705.602,00	1.321.816.383,00
3	Pajak Hiburan	1.482.844.083,00	675.947.511,00	2.158.791.594,00
4	Pajak Parkir		180.406.759,00	180.406.759,00
5	Pajak Reklame	410.715.875,00	415.854.674,00	826.570.549,00
6	Pajak PAT	9.778.580,00	11.734.364,00	21.512.944,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.985.175.060,00</b>	<b>1.651.815.160,00</b>	<b>4.636.990.220,00</b>

*Sumber; BPK Prov. Jawa Barat 2018*

- d. Penyajian tunggakan terkait WP dengan NOP sebesar Rp1.640.348.643,00 belum sepenuhnya dapat diidentifikasi

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern No 53.B/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 20 Mei 2015 diketahui bahwa terdapat pembayaran PBB sebesar Rp1.640.348.643,00 yang diakui sebagai Nomor Obyek Pajak (NOP) baru. Namun tidak seluruhnya NOP baru tersebut merupakan NOP yang diterbitkan pada tahun 2014. Terdapat juga NOP yang telah diterbitkan sebelum tahun 2014 dan ditetapkan kembali pada 2014 karena adanya perubahan status objek pajak. Atas kondisi tersebut Disyajak belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi rincian NOP baru dan NOP yang ditetapkan kembali tersebut beserta nilai tunggakannya.

- e. Penatausahaan data WP Non Aktif pada MDP belum tertib

Dari permasalahan permasalahan yang disebutkan di atas mengakibatkan penyajian piutang pajak sebesar Rp.7.378.969.054,00 (Rp652.420.156,00 + Rp449.210.035,00 + Rp4.636.990.220,00 + Rp1.640.348.643,00) tidak dapat diyakini kewajarannya.

Pada Persediaan per 31 Desember 2016 yaitu adanya kelemahan SPI dalam penyajian piutang sewa tanah per 31 desember 2016 minimal sebesar Rp4.057.923.858,00 belum dapat diyakini kewajarannya.

**Tabel 1.6**  
**Piutang pendapatan lainnya yang terdapat pada neraca TA 2016**

No	Uraian	2015	2016
	Piutang pendapatan	92.841.260.631,81	159.886.089.206,62
	Lainnya		

Sumber; BPK Prov. Jawa Barat 2018



Dalam Neraca Pemerintahan Kota Bandung per 31 Desember 2016 menyajikan Piutang Pendapatan Lainnya untuk tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp159.886.089.206,62 dan Rp92.841.260.631,81. Diantara piutang tersebut adalah Piutang Sewa Tanah sebesar Rp31.692.880.150,00 dan Piutang Denda Sewa Tanah sebesar Rp7.404.333.909,00.

**Tabel 1.7**  
**Rincian Piutang Sewa Tanah dan Denda Tahun 2001 s.d 2016**

No	Tahun	Piutang Sewa Tanah Bangunan (Rp)		Jumlah
		Pokok	Denda	
1	2	3	4	5=3+4
1	s.d Tahun 2001	1.461.000,00	146.100,00	1.607.100,00
2	Tahun 2002	14.051.009,00	3.372.240,00	17.423.249,00
3	Tahun 2003	44.504.304,00	10.681.009,00	55.185.313,00
4	Tahun 2004	85.725.611,00	20.574.112,00	106.299.723,00
5	Tahun 2005	160.725.795,00	38.574.122,00	199.299.917,00
6	Tahun 2006	379.513.033,00	91.082.932,00	470.595.935,00
7	Tahun 2007	698.197.133,00	167.566.983,00	865.764.116,00
8	Tahun 2008	1.164.241.507,00	279.417.552,00	1.443.695.059,00
9	Tahun 2009	1.450.380.802,00	348.090.871,00	1.798.471.673,00
10	Tahun 2010	1.849.556.567,00	443.892.928,00	2.293.449.495,00
11	Tahun 2011	2.261.815.780,00	542.835.055,00	2.804.650.835,00
12	Tahun 2012	2.785.678.909,00	668.562.072,00	3.454.240.981,00
13	Tahun 2013	3.367.602.055,00	808.223.496,00	4.175.825.551,00
14	Tahun 2014	3.872.618.922,00	929.427.397,00	4.802.046.319,00
15	Tahun 2015	6.434.023.823,00	1.544.164.469,00	7.978.188.292,00
16	Tahun 2016	7.122.783.930,00	1.507.722.571,00	8.630.506.501,00
	Jumlah total	31.692.880.150,00	7.404.333.909,00	39.097.214.059,00

Sumber; BPK Prov. Jawa Barat 2018

Tabel 1.7 menyatakan bahwa rincian piutang sewa tanah dan denda tahun 2001 s.d 2016 sebesar Rp39.097.214.059,00. Dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Bandung Tahun 2015 dalam laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem pengendalian Intern No.21.B/LHP/XVIII.BDG/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 menyatakan adanya kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan piutang sewa tanah dengan pemerintahan:

- a. Piutang Sewa Tanah Minimal atas 22 penyewa sebesar Rp260.186.204,00 sudah berpindah tangan.
- b. Piutang Sewa Tanah minimal atas tiga penyewa sebesar Rp25.122.700,00 kurang ditetapkan.

Hasil pemeriksaan pengelolaan Piutang Sewa Tanah dan Denda Tanah tahun 2016, yang sejak tahun 2017 dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan, diketahui masih terdapat permasalahan kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan Piutang sewa Tanah dan Denda Sewa Tanah, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Piutang Sewa Tanah atas 2.183 penyewa minimal sebesar Rp3.559.827.112,00 tidak dapat diyakini kebenarannya

**Tabel 1.8**  
**Nilai Piutang Yang Perjanjiannya Telah Berakhir**

No	Jatuh Tempo Perjanjian	Jumlah
1	s.d 2001	599.907.740,00
2	2002	105.341.429,00
3	2003	134.713.236,00
4	2004	304.901.800,00
5	2005	101.790.302,00
6	2006	134.418.148,00
7	2007	315.230.860,00
8	2008	173.110.662,00
9	2009	99.507.088,00
10	2010	177.431.728,00
11	2011	148.704.560,00
12	2012	198.789.022,00
13	2013	655.795.775,00
14	2014	218.041.878,00
15	2015	192.142.884,00
	Jumlah	3.559.827.122,00

- b. Terdapat selisih antara saldo piutang berdasarkan perhitungan mutasi dengan saldo Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp212.787.842,00

**Tabel 1.9**  
**Perhitungan Selisih Mutasi Nilai Piutang dengan Neraca**

No	Uraian	Nilai Piutang (Rp)
1	Saldo Awal	34.696.642.152,00
2	Pembayaran Piutang Tahun 2015	(5.068.357.176,00)
3	Pembayaran Piutang Tahun 2016	8.630.506.501,00
4	Jumlah Piutang berdasarkan Perhitungan mutasi (1+2+3)	38.258.791.477,00
5	Perhitungan Menurut Neraca	39.097.214.059,00
6	Selisih (4-5)	(838.422.582,00)

Tabel 1.9 menyatakan bahwa hasil penelusuran terhadap catatan dan penerimaan pembayaran piutang sewa tanah dan denda sewa tanah menunjukkan bahwa terdapat selisih sebesar Rp838.422.582,00 antara nilai piutang yang dilaporkan di dalam Neraca dengan nilai piutang berdasarkan perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan piutang. Kepala bidang Perberdayaan Aset BPKAD menjelaskan bahwa selisih tersebut terjadi karena terdapat piutang tahun 2015 yang belum tercatat, dan adanya penyesuaian NJOP dan koefisien atas piutang tahun 2015. Nilai piutang yang belum tercatat adalah sebesar Rp625.634,740,00 sedangkan sisanya sebesar Rp212.787.842,00 ( $\text{Rp838.422.582,00} - \text{Rp625.634,740,00}$ ) belum dapat dijelaskan.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian nilai Piutang Sewa Tanah atau Bangunan minimal sebesar Rp4.057.923.858,00 ( $\text{Rp260.186.204,00} + \text{Rp25.122.700,00} + \text{Rp3.599.827.122,00} + \text{Rp212.787.842,00}$ ) dalam Neraca per 31 Desember belum dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka peneliti menjabarkan fenomena sebagai berikut, belum dipatuhinya mekanisme penyampaian rekap izin dan nota perhitungan dari BPPT ke Disyanjak, Kepala Bidang Pajak Penetapan Disyanjak tidak cermat dalam menerbitkan SKPD Pajak Reklame, Dinas Pelayanan Pajak belum melaksanakan kegiatan inventarisasi, verifikasi dan validasi piutang pajak, belum, Kepala BPKAD belum memiliki perencanaan, sasaran, dan strategi yang memadai untuk

melaksanakan inventarisasi dan validasi atas aset yang disewakan serta memperbarui data penyewa dan perjanjian sewa telah kadaluarsa, aplikasi sistem informasi sewa tanah yang digunakan tidak dapat menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyajian piutang di laporan keuangan dan, Kepala Bidang Pemberdayaan Aset BPKAD dan Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Daerah tidak tegas dalam menegakkan sanksi kepada penyewa yang menunggak maupun yang tidak memperbaharui perjanjian sewa.

Dari penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung ”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Belum dipatuhinya mekanisme penyampaian rekap izin dan nota perhitungan dari BPPT ke Disyajak.
2. Kepala Bidang Pajak Penetapan Disyajak tidak cermat dalam menerbitkan SKPD Pajak Reklame.
3. Dinas Pelayanan Pajak belum melaksanakan kegiatan inventarisasi, verifikasi dan validasi piutang pajak.

4. Kepala BPKAD belum memiliki perencanaan, sasaran, dan strategi yang memadai untuk melaksanakan inventarisasi dan validasi atas aset yang disewakan serta memperbarui data penyewa dan perjanjian sewa telah kadaluarsa.
5. Aplikasi sistem informasi sewa tanah yang digunakan tidak dapat menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyajian piutang di laporan keuangan dan,
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset BPKAD dan Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Daerah tidak tegas dalam menegakkan sanksi kepada penyewa yang menunggak maupun yang tidak memperbaharui perjanjian sewa.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

“Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung?”

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah”.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta sumbangan pemikiran dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu sosial, serta menambah wawasan dalam keilmuan Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Untuk memperluas kemampuan berfikir dan menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **b. Bagi Instansi Terkait**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan Kepala Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan daerahnya di masa yang akan datang.

#### **c. Untuk peneliti lain**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi selanjutnya dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih spesifik dan lebih mendalam.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang.

Geodhart dalam Alfin Sulaiman (2011:20) memberikan penjelasan mengenai keuangan negara yakni keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran tersebut.

Untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang ada, maka diperlukan adanya landasan teori. Teori dapat menjadi acuan dalam menyusun kerangka pemikiran dan rancangan teori

Menurut Mahmudi (2016: 20) pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,



pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 yang dikutip yang dikutip oleh Mahmudi (2016: 20) pengendalian intern memiliki 5 komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah dan akuntabilitas tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan demikian, informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemikat. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami, dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi tersebut.

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu dwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. (SAP, 2010: 235). Menurut Mahmudi (2010: 11) laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel bebas yaitu Sistem Pengendalian Intern.

Adapun bentuk kerangka pemikiran penelitiannya disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Gambar 1.**  
**Kerangka Pemikiran**



#### **G. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menyatakan bahwa hipotesis peneliti sebagai berikut: Adanya pengaruh secara signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung”.